

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 membahas mengenai pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten & kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 menjelaskan pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus sendiri daerah otonom dan kepentingan masyarakat dalam tatanan sistem negara republik Indonesia. Menurut Jahidin (2019) asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki tujuan untuk mendorong kesejahteraan rakyat daerah.

Pemerintah pusat mewakilkan tugas dan fungsi desentralisasi kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerah otonom secara mandiri. Menurut Kusriyah (2019) desentralisasi merupakan pelimpahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah diberikan hak dan tanggung jawab bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur daerah otonomi dan pengelolaan keuangan secara mandiri.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, pemerintah daerah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian ditetapkan bersama DPRD menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk satu tahun anggaran. Struktur utama APBD yaitu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. UU Nomor 23 tahun 2014, mendefinisikan pendapatan daerah yaitu semua kekayaan dan hak daerah sebagai penambah kekayaan bersih pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah menurut Halim (2012) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber daya suatu wilayah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam struktur APBD, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh tingkat kontribusi dalam hal pembiayaan anggaran dan pembangunan daerah.

Pendapatan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau izin tertentu dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Dalam hal penerapan kebijakan mengenai pendapatan retribusi, penting diketahui mengenai tingkat efektivitas pendapatan retribusi yang diperoleh melalui anggaran

yang diterapkan dengan realisasi pendapatan dalam satu periode. Rasio efektivitas pendapatan retribusi dapat dijadikan tolak ukur oleh pemerintah daerah dalam melakukan analisis terkait target perolehan anggaran dengan realisasi pungutan pendapatan retribusi.

Penelitian terkait efektivitas pendapatan retribusi telah banyak dilakukan pada berbagai provinsi/kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Abyadh Nuruttimani Fahmi Ridho (2020) terkait tingkat kontribusi, efisiensi, dan efektivitas pendapatan retribusi pada pemerintah kabupaten Trenggalek, sedangkan dalam lingkup pemerintah provinsi Lampung dilakukan oleh Afifah Husna Rosyada (2017) tentang efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD provinsi Lampung tahun 2011-2015 dalam perspektif ekonomi islam. Kesimpulan yang diperoleh terkait analisis efektivitas pemerintah provinsi Lampung, yaitu masih terdapat tingkat efektivitas yang dinilai cukup efektif terkait pajak daerah dan sangat efektif terkait retribusi daerah.

Mengingat pentingnya efektivitas pemungutan pendapatan retribusi terhadap anggaran yang telah ditetapkan bagi penerapan kebijakan pemerintah provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020, penulis berkeinginan melakukan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Analisis atas Efektivitas dan Pelaporan Pendapatan Retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017-2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa masalah terkait pendapatan retribusi sebagai berikut:

- 1) Bagaimana klasifikasi dan jenis pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020?
- 2) Bagaimana pemberlakuan kebijakan pencatatan, akuntansi, dan pelaporan pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020?
- 3) Bagaimana tingkat efektivitas pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulis menyusun KTTA ini dalam rangka mengaplikasikan pembelajaran yang telah penulis peroleh selama masa pendidikan di PKN STAN dengan praktik lapangan. Adapun tujuan yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami jenis pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- 2) Untuk memahami kebijakan atas klasifikasi pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- 3) Untuk memahami terkait pelaporan pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- 4) Untuk memahami seberapa efektif pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan KTTA ini terkait pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020, yang akan berfokus terhadap:

- 1) Klasifikasi dan jenis pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020.
- 2) Analisis tingkat efektivitas pendapatan retribusi pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017-2020.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis bertujuan dalam penulisan KTTA ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada pihak yang membutuhkan, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan penulisan KTTA ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan analisis tingkat efektivitas pendapatan retribusi dan memberikan manfaat bagi perkembangan akuntansi pemerintahan khususnya terkait pendapatan retribusi.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penulis berkeinginan membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan realisasi dan anggaran pendapatan retribusi, serta memberikan pertimbangan terkait tingkat efektivitas pendapatan retribusi tahun anggaran 2017-2020.

- b. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan penulisan KTTA ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terkait aplikasi pembelajaran selama perkuliahan di PKN STAN dengan praktik di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap dapat membantu masyarakat dalam menambah pengetahuan terkait pentingnya pendapatan retribusi bagi pemerintah, serta memberikan pengertian kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menjaga pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan akan menjelaskan latar belakang yang mendasari topik, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan asli daerah, kebijakan akuntansi dan pencatatan, laporan keuangan pemerintah daerah, dan rasio analisis efektivitas retribusi daerah.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang dua sub-bab penting, yaitu gambaran umum terkait objek penulisan dan hasil analisis yang akan dibahas penulis. Sub-bab pertama, gambaran umum terkait objek penulisan akan menjelaskan mengenai wilayah, visi dan misi, dan struktur organisasi pemerintah provinsi Lampung. Sub-bab kedua, hasil analisis yang akan dibahas penulis berisi tentang peninjauan terkait pendapatan retribusi dan praktik pendapatan retribusi pada laporan keuangan pemerintah daerah mengenai tingkat efektivitas pendapatan retribusi dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan akan menjelaskan seluruh rumusan masalah yang ingin disampaikan oleh penulis.